



LAPORAN TRIWULAN III
DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025



Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12
Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 32241PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat-Nya Laporan Triwulan III Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan Triwulan III atas kinerja Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi dan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Selain itu Laporan kinerja pada Dinas juga berfungsi sebagai media informasi dan bahan evaluasi pelaksanaan untuk kinerja yang belum tercapai sebagai upaya perbaikan kualitas kinerja yang lebih baik lagi.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna, Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan. Laporan ini dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan pendorong peningkatan kinerja organisasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Demikian laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih

Palangka Raya, Oktober 2025

KEPALA DINAS,



EDDY KARUSMAN, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP.19770207 200311004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI.	ii
BAB.I KINERJA	
Kinerja program dan Kegiatan Substansial	1
BAB.II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	
A. Kendala dan Permasalahan.....	14
B. Tindak Lanjut Penyelesaian	14
BAB.I PENUTUP	
Penutup.....	16
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I KINERJA

Kinerja Program dan Kegiatan Substansial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tersebut diatas Tugas pokok Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi bidang sosial skala provinsi, sedangkan fungsi Dinas Sosial Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
3. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

5. Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Sosial
6. Pelayanan sosial pada Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pada Tahun 2025 pencapaian target kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 3 sasaran strategis yaitu pengentasan kemiskinan, pelayanan SPM Bidang Sosial di dalam panti dan penurunan stunting yang ingin dicapai melalui 7 Program, 20 Kegiatan dan 95 sub kegiatan yang telah disusun untuk pencapaian target kinerja tersebut.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Pada Triwulan II didukung dengan anggaran belanja APBD Murni Tahun 2025 sebesar Rp 45.744.656.086 (Empat puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah) dengan capaian realisasi untuk Triwulan II sebesar Rp 19.477.419.601 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan ribu enam ratus satu rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar 42,58 % dengan realisasi fisik 50 %.

Adapun target kinerja pada Tahun 2025 yang dirancang untuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta berubah perilaku sosialnya.	%	85
2.	Meningkatnya kemampuan, partisipasi dan peran serta Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan, partisipasi dan peran serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	%	84

3.	Tersalurkannya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	100
----	--	--	---	-----

Sasaran strategis diatas dapat dicapai maka diperlukan dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini adalah penjabaran rencana strategis kedalam bentuk target yang dicapai untuk Tahun 2025. Sampai triwulan III capaian kinerja pada Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Triwulan III Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta berubah perilaku sosialnya.	85%	50 %
2.	Meningkatnya kemampuan, partisipasi dan peran serta Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan, partisipasi dan peran serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	84%	20 %
3.	Tersalurkannya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	100 %	- %

Sasaran strategis diatas dapat dicapai maka diperlukan dukungan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Program yang mendukung kegiatan diatas adalah sebagai berikut

Tabel 1.3
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Kinerja
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan di dalam panti	%	85
		Program Rehabilitasi Sosial			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	40
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	Jumlah Anak terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	60
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	50
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	15
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HI/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HI/AIDS & NAPZA terlantar mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	20

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Migran yang mendapatkan penanganan dan pelayanan sosial	%	100
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal	Orang	100
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100
		Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	10
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase warga miskin yang dikelola oleh Provinsi	%	100
			Jumlah Keluarga KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluarga	50.000
			Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	100

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
			Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Orang	350
		Program Penanganan Bencana	Persentase penerima manfaat yang mendapatkan penanganan bencana	%	100
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	1.000
2.	Meningkatnya kemampuan, partisipasi dan peran serta Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan keahlian dan kemampuannya dalam penanganan sosial	%	84
		Program Pemberdayaan Sosial			
		Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Sosial Provinsi	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan keahlian dan kemampuannya dalam penanganan sosial	%	100
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	1
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan	Orang	136

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target
			Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	30
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman makam pahlawan yang ditangani	Unit	1
3.	Tersalurkannya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase data warga miskin yang dikelola oleh Provinsi	%	100

Sedangkan capaian program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Triwulan III Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan III			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	%	85 %	60 %	50 %	83,33 %	
	Program Rehabilitasi Sosial							
		Jumlah Penyandang disabilitas terlanter yang mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	40	40 Orang	40 Orang	100	
		Jumlah Anak terlanter mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	60	60 Orang	60 Orang	100	
		Jumlah lanjut usia terlanter mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	50	50 Orang	45 Orang	90	
		Jumlah gelandangan dan pengemis terlanter mendapatkan pelayanan dalam panti	Orang	10	10 Orang	10 Orang	100	
		Jumlah Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Kekerasan dari titik debarkasi di daerah Provinsi	Orang	100	75 Orang	38 Orang	50,66	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)
		untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/Kota asal						
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang	10	5 Orang	- Orang	-	
		Jumlah Keluarga KPM yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KPM	50000	37500	37500	100	
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang	500	125 Orang	100 Orang	80	
2.	Meningkatnya kemampuan, partisipasi dan peran serta Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan keahlian dan kemampuannya dalam penanganan sosial	%	83	60	20	33,33	
Program Pemberdayaan Sosial								
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga	1	1 Lembaga	-	-	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan III			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dok	1	1 Dok	- Dok	-	
		Jumlah Taman makam pahlawan yang ditangani	Unit	1	1 Unit	1 Unit	100	
3	Tersalurkannya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%		75 %	-	-	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
		Persentase data warga miskin yang dikelola oleh Provinsi	%	100	75 %	68 %	90,66	

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah juga merupakan salah satu perangkat daerah yang mengurus urusan wajib pelayanan dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi empat kegiatan yaitu kegiatan rehabilitasi sosial di dalam panti sosial kewenangan Provinsi dan kegiatan penanganan bencana pasca bencana cakupan wilayah Provinsi.

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah juga merupakan OPD yang menangani masalah kemiskinan ekstrim dan juga penanganan stunting.

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi yang mempengaruhi capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Data penerima bantuan sosial yang tidak valid dan menyebabkan salah sasaran dalam pemberian bantuan sosial.
2. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum terdata secara akurat disebabkan oleh pergantian personil dan kurangnya SDM yang mendata PSKS.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia untuk pelayanan di dalam panti sehingga pelayanan bagi penerima manfaat di dalam panti belum dapat dilaksanakan secara maksimal .
4. Belum optimalnya kolaborasi antara Dinas Sosial dengan instansi terkait serta CSR dalam penanganan PPKS yang ada di Kalimantan Tengah.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Adapun tindak lanjut penyelesaian dari kendala dan permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk melakukan verifikasi dan validasi DTSEN yang digunakan sebagai basis data penerima bantuan sosial dan bantuan lainnya untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

2. Melakukan updating data PSKS yang menjadi mitra Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya untuk membantu Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dalam penanganan masalah sosial.
3. Menambah anggaran, sarana dan prasarana untuk pemenuhan layanan bagi penerima manfaat di dalam panti sehingga pelayanan bagi penerima manfaat dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta sebagai bentuk upaya dalam penanganan PPKS di Kalimantan Tengah.

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan sesuai dengan mandat yang dipercayakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu laporan ini juga berguna sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung terwujudnya pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang memerlukan pelayanan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Triwulan III Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan semoga bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial berikutnya.

LAMPIRAN

A. LAPORAN KINERJA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Capaian Triwulan III			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta berubah perilaku sosialnya.	%	85	60 %	50 %	83,33 %	
2.	Meningkatnya kemampuan, partisipasi dan peran serta Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS).	Persentase PSKS yang meningkat kemampuan, partisipasi dan peran serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	%	83	60	20	33,33	
3.	Tersalurkannya Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Miskin)	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	%	100	-	-	-	

B. Laporan Keuangan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	9	8
1.	Program Pemberdayaan Sosial							
	a.	Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Sosial Provinsi		399.542.800	335.273.952	168.003.600	50,11	
			a.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	70.314.000	60.062.260	22.000.000	36,63
			b.	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	82.670.000	56.536.226	15.680.000	27,73
			c.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	246.558.800	218.675.466	130.323.600	59,59

2.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan				129.200.000	104.191.000	72.368.500	69,46	
	b.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			129.200.000	104.191.000	72.368.500	69,46	
			a.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipuahkan ke Daerah Kabupaten/ Kota Asal	129.200.000	104.191.000	72.368.500	69,46	
3	Program Rehabilitasi Sosial				5.070.153.882				
	c.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti			1.075.790.000	863.668.273	658.648.239	76,26	
			a.	Penyediaan Permakanan	650.000.000	487.737.288	392.116.200	80,39	
			b.	Penyediaan Sandang	90.000.000	90.000.000	46.153.000	51,28	

			c.	Penyediaan Alat Bantu	28.318.000	28.318.000	-	-	
			c.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	40.000.000	36.600.000	29.283.239	80,00	
			d.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial	53.410.000	37.984.137	29.887.600	78,68	
			e.	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari	85.802.000	69.848.848	66.295.700	94,91	
			f.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	1.460.000	1.460.000	-	-	
			g.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	79.240.000	64.160.000	51.792.500	80,72	
			h.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	23.075.000	23.075.000	22.520.000	97,59	
			i.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24.485.000	24.485.000	20.600.000	84,13	
	d.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti			1.586.460.968	1.362.202.182	534.649.939	39,25	
			a.	Pengasuhan	117.000.000	117.000.000	60.240.000	51,49	
			b.	Penyediaan Makanan	867.588.500	690.223.800	155.270.739	22,49	
			c.	Penyediaan Sandang	176.080.000	176.080.000	72.378.000	41,11	

			d.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	75.000.000	75.000.000	28.904.500	38,54	
			e.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	17.193.268	17.193.268	14.347.450	83,45	
			f.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24.820.000	24.820.000	15.227.250	61,35	
			g.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	82.144.200	49.593.580	30.896.000	62,29	
			h.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	13.060.000	13.060.000	5.891.000	45,11	
			i.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60.000.000	60.000.000	56.885.000	94,81	
			j.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60.000.000	58.108.000	24.610.000	42,35	
			k.	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	40.000.000	32.280.000	35.000.000	108,43	
			l.	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	53.575.000	48.833.534	35.000.000	71,67	
	e.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti			1.273.005.000	1.036.744.299	631.208.754	60,88	

			a.	Penyediaan Permakanan	900.000.000	687.600.000	512.390.218	74,52	
			b.	Penyediaan Sandang	103.065.000	81.315.300	-	-	
			c.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	60.000.000	59.997.000	20.656.900	34,43	
			d.	Penyediaan Alat Bantu	9.000.000	9.000.000	-	-	
			e.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	36.000.000	36.000.000	25.974.636	72,15	
			f.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	24.000.000	24.000.000	-	-	
			g.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	10.000.000	10.000.000	-	-	
			h.	Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas	1.500.000	1.500.000	-	-	
			i.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.500.000	2.500.000	2.310.000	92,4	
			j.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.800.000	12.800.000	2.060.000	16,09	
			k.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12.940.000	12.940.000	9.570.000	73,96	
			l.	Pemulasaraan	74.000.000	74.000.000	38.000.000	51,35	
			m.	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial	27.200.000	25.091.999	20.247.000	80,69	

				Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti					
	f.	Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti			308.530.000	247.093.154,70	48.255.350	19,53	
			a.	Penyediaan Permakanan	55.000.000	44.000.777	1.060.000	2,41	
			b.	Penyediaan Sandang	10.000.000	8.007.172	-	-	
			c.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	5.000.000	4.000.000	-	-	
			c.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	50.000.000	40.048.000	2.665.000	6,65	
			d.	Pemberian Bimbingan Aktlitas Hidup Sehari-Hari	50.000.000	39.800.523,70	4.110.350	10,33	
			e.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	50.000.000	40.000.938	-	-	
			f.	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	4.040.000	-	-	
			g.	Pemulangan Ke Daerah Asal	51.000.000	40.858.800	21.180.000	51,84	
			h.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di Dalam Panti	32.530.000	26.336.944	19.240.000	73,05	

	g.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HI/AIDS & NAPZA di Dalam Panti			826.367.914	678.971.503,40	529.571.210	77,99	
			a.	Penyediaan Permakanan	294.000.000	235.200.262	184.253.480	78,34	
			b.	Penyediaan Sandang	36.000.000	25.202.373	18.990.000	75,35	
			c.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	100.000.000	79.360.000	53.055.000	66,85	
			d.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	145.000.000	115.198.668,40	83.643.870	72,61	
			e.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	15.000.000	12.000.000	2.715.860	22,63	
			f.	Pemulangan ke Daerah Asal	80.000.000	63.938.700	62.515.000	99,77	
			g.	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HI/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	156.367.914	148.071.500	124.398.000	84,01	

4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				2.442.671.004	301.685.867	143.018.887	47,41	
	h.	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal			23.040.000	18.986.800	8.540.000	44,98	
			a.	Pengangkatan Anak Antar WNI	23.040.000	18.986.800	8.540.000	44,98	
	i.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			2.419.631.004	282.699.067	134.478.887	47,57	
			a	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	438.584.000	32.828.000	21.951.687	66,87	
			b	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	146.778.000	-	-		
			c	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.834.269.004	249.871.067	112.527.000	45,03	
5.	Program Penanganan Bencana				1.576.959.647	926.468.559,02	197.749.008	21,34	
	j.	Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			1.576.959.647	926.468.559,02	197.749.008	21,34	
			a.	Penyediaan Permakanan	247.000.00	247.000.000	-	-	
			b.	Penyediaan Sandang	150.000.000	149.487.750	-	-	

			c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	150.000.000	149.240.000	-	-	
			d.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100.000.000	100.000.000	-	-	
			e.	Pelayanan Dukungan Psikososial	929.959.647	280.740.809,02	197.749.008	70,44	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				1.300.000.000	686.737.000	232.505.328	33,86	
	k.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			1.300.000.000	686.737.000	232.505.328	33,86	
			a.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	1.000.000.000	386.737.000	-	-	
			b.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	220.000.000	220.000.000	183.670.000	83,49	
				Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	80.000.000	80.000.000	48.835.328	61,04	

Palangka Raya, Oktober 2025

KEPALA DINAS,



EDDY KARUSMAN, ST., MT

Pembina Utama Muda

NIP.19770207 200312 1 004